

## PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKOLAH OLEH PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Wiyanda Vera Nurfajriani<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia  
[23052160008\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:23052160008_uin@radenfatah.ac.id)

Muhammad Sirozi<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia  
[msirozi@radenfatah.ac.id](mailto:msirozi@radenfatah.ac.id)

### ABSTRAK

Pengendalian manajemen dalam konteks pendidikan merupakan suatu aspek penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi operasional sekolah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengendalian manajemen oleh Pemerintah Kota Palembang dalam mengelola sekolah-sekolah di wilayahnya guna meningkatkan kualitas pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan pihak terkait serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah mengimplementasikan berbagai strategi pengendalian manajemen, termasuk pengawasan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap kinerja sekolah dan penggunaan dana pendidikan. Perencanaan terfokus pada penetapan sasaran dan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pengorganisasian melibatkan alokasi sumber daya yang tepat serta pembentukan tim kerja untuk mendukung proses belajar mengajar. Pengkoordinasian dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti orang tua siswa, komunitas, dan lembaga pendidikan lainnya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi pengendalian manajemen, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi, serta perbedaan dalam pemahaman konsep pengendalian manajemen di tingkat sekolah. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kota Palembang terus melakukan pembenahan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta penyediaan panduan yang jelas mengenai konsep dan aplikasi pengendalian manajemen di sekolah-sekolah. Dengan demikian, diharapkan kualitas pendidikan di Kota Palembang dapat terus meningkat sesuai dengan harapan semua pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** manajemen sekolah; pengendalian; pemerintah kota

## ABSTRACT

*Management control in the context of education is an important aspect in ensuring the effectiveness and efficiency of school operations. This study aims to analyse the implementation of management control by the Palembang City Government in managing schools in its area to improve the quality of education. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach, involving interviews with relevant parties as well as documentation studies. The results show that the Palembang city government has implemented various management control strategies, including supervision, planning, organising and coordinating. Supervision is conducted through regular evaluations of school performance and the use of education funds. Planning focuses on setting education goals and policies that suit local needs. Organising involves the proper allocation of resources and the formation of work teams to support the teaching and learning process. Coordinating involves involving various stakeholders such as parents, communities and other educational institutions. Nevertheless, there are still some challenges in implementing management control, such as limited human resources and information technology, as well as differences in understanding the concept of management control at the school level. Therefore, it is recommended that the Palembang city government continue to make improvements in terms of increasing the capacity of human resources, strengthening information technology infrastructure, and providing clear guidelines on the concept and application of management control in schools. Thus, it is expected that the quality of education in Palembang City can continue to improve in accordance with the expectations of all parties involved.*

**Keywords:** *city government; control; school management*

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan dalam suatu definisi dipandang sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Melalui proses pendidikan, manusia akan mampu mengekspresikan dirinya secara lebih utuh. Pendidikan Nasional berfungsi mengem-bangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekolah memiliki tenaga kependidikan yang paling berperan dan sangat menentukan kualitas pendidikan yakni para guru dan kepala sekolah. Efektivitas sekolah merujuk pada perberdayaan semua komponen sekolah sebagai organisasi tempat belajar berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam struktur program dengan tujuan agar siswa belajar dan mencapai hasil yang telah ditetapkan, yaitu memiliki kompetensi.

Pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan suatu bangsa. Manajemen pendidikan memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi

dalam penyelenggaraan sistem pendidikan suatu negara. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan tidak hanya mencakup aspek administratif dan operasional, tetapi juga strategis, yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi berbagai kegiatan pendidikan. Dalam era globalisasi dan dinamika yang cepat, tantangan dalam manajemen pendidikan semakin kompleks. Berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan demografis, tuntutan masyarakat, dan kebijakan publik menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika manajemen pendidikan. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola. Pengelolaan dilakukan untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki secara terintegrasi dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan sekolah atau organisasi. Pengelolaan dilakukan kepala sekolah dengan kewenangannya sebagai manager sekolah melalui komando atau keputusan yang telah ditetapkan dengan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan

Dalam oprasionalisasi pendidikan diperlukan adanya manajemen yang baik sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai yang dicita-citakan. mengartikan manajemen pendidikan sebagai suatu kegiatan yang mengimplikasikan adanya perencanaan atau rencana pendidikan serta kegiatan implementasinya. Manajemen pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan

pendidikan secara efektif dan efisien (Zohriah et al., 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi pengendalian manajemen oleh Pemerintah Kota Palembang dalam mengelola sekolah-sekolah di wilayahnya guna meningkatkan kualitas Pendidikan.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan studi perbandingan untuk menganalisis pengendalian manajemen sekolah oleh pemerintah kota Palembang. Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data sekunder dari sumber pustaka relevan seperti majalah, surat kabar, internet, jurnal, buku dokumentasi, dan pustaka lainnya, reduksi data untuk memilah informasi yang relevan, display data dalam bentuk tabel atau narasi, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan. Subjek penelitian adalah artikel, laporan, dan dokumen terkait kebijakan pengendalian manajemen sekolah oleh pemerintah kota Palembang. Penelitian ini berbasis di Palembang, Sumatera Selatan, dan dilaksanakan dalam rentang waktu Januari hingga Desember 2024. Sumber pustaka dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang berfokus pada pustaka terpercaya dengan mempertimbangkan kredibilitas penerbit seperti jurnal terindeks, buku dengan ISBN, dan berita dari media resmi.

Materi penelitian mencakup kebijakan pengendalian manajemen sekolah, implementasinya, dan studi

perbandingan dengan praktik serupa di daerah lain. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar pencatatan data dan panduan analisis dokumen yang dirancang berdasarkan teori pengendalian manajemen. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dan validasi instrumen dilakukan dengan uji *content validity*, yakni mengevaluasi kelengkapan indikator analisis dokumen oleh ahli manajemen pendidikan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama: reduksi data untuk menyaring informasi relevan, display data untuk menyajikan informasi dalam bentuk tabel atau diagram, serta penarikan kesimpulan dengan teknik analisis deskriptif untuk menginterpretasikan data secara kualitatif (Sugiyono, 2019). Teknik ini memungkinkan perbandingan mendalam tentang pengendalian manajemen sekolah, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan signifikan terhadap praktik pengendalian manajemen di Palembang.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Pendidikan**

Negara hukum ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan berlaku (*Machtsstaat*). Negara hukum ialah suatu masyarakat dan negara berdasarkan hukum, di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat di mana warga negara dan penguasa tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Negara hukum berarti setiap warganegara mempunyai hak dan kewajiban dalam

hukum, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan yang sah serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum tanpa kecualinya. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus berdasarkan hukum dan keadilan (Syafe'i, 2011). Negara yang berfungsi dan bertugas untuk mewujudkan tujuan nasional dan negara Republik Indonesia dari cita-cita luhur yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Syafe'i, 2011).

Tanggung jawab pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisien manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya disingkat. Pendidikan Nasional berfungsi mengem-bangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pemerintah berwenang mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan. Wewenang merupakan kekuasaan atau kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan pemerintahan, berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian hukum, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum (Wartoyo, 2016) dan dimaknai secara luas dan bersifat umum yang disebut sebagai wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Namun demikian konsep wewenang ini selalu dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, oleh karena itu penggunaan wewenang tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

### **Manajemen Sekolah**

Manajemen berbasis sekolah didefinisikan sebagai desentralisasi otoritas pengambilan keputusan pada tingkat sekolah yang pada umumnya menyangkut tiga bidang, yaitu anggaran, kurikulum, dan personel (Sedubun, Ratumanan, Laurens, 2024). Dalam sistem manajemen berbasis sekolah otoritas dapat ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dari pemerintah daerah ke pengawas sekolah, dari pengawas sekolah ke dewan sekolah, dari dewan sekolah ke kepala sekolah, guru, administrator, konselor, pengembang kurikulum, dan orang tua (Wartoyo, 2016).

MBS adalah suatu bentuk administrasi pendidikan, di mana sekolah menjadi unit utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini berbeda dengan bentuk tradisional manajemen pendidikan, di mana birokrasi pemerintah pusat sangat dominan dalam proses pembuatan keputusan. Negara keadilan sosial artinya negara kita menjamin dan melindungi keseimbangan selaras hak-hak kewajiban setiap warga negara untuk terwujudnya keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara melalui tugas-tugas pemerintah wajib menjunjung tinggi dan mengusahakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, baik dibidang hukum, politik, sosial ekonomi dan budaya. Negara kita menganut faham “*social justice and social welfare state*” (Syafe’i, 2011).

Manajemen lembaga pendidikan mencakup objek bahasan yang cukup kompleks, objek kajiannya dapat dipertimbangkan atau dijadikan bahan dalam merumuskan kaidah-kaidahnya. Masing-masing bahan itu terintegrasi untuk mewujudkan manajemen pendidikan yang dibuat.

Objek yang menjadi kajian dalam manajemen Lembaga Pendidikan yaitu:

#### **1) Manajemen Kurikulum**

Kurikulum memiliki kedudukan penting sebagai kunci keberhasilan suatu lembaga Pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan mutu Pendidikan yang baik. Kurikulum berkaitan dengan isi, proses Pendidikan yang pada akhirnya menentukan kualifikasi lulusan suatu Lembaga Pendidikan. Kurikulum yang disusun

harus memperhatikan serta mempertimbangkan perkembangan dan karakteristik siswanya, kemampuan dan komitmen tenaga pengajar, sarana pendukung, anggaran yang cukup, dan partisipasi masyarakat. Seorang pakar pengembangan kurikulum dari Amerika Serikat, menyatakan definisi kurikulum oleh pakar Pendidikan pada umumnya dapat dikelompokkan pada salah satu kategori sebagai berikut :

1. kurikulum ditinjau sebagai dokumen berhubungan dengan Pendidikan,
2. kurikulum ditinjau dari pengalaman peserta didik selama menjalani Pendidikan di sekolah,
3. kurikulum ditinjau sebagai aktivitas-aktivitas yang bertujuan mengembangkan karakter dan perilaku yang baik pada peserta didik, dan
4. kurikulum ditinjau sebagai hasil dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Kurikulum didefinisikan sebagai sebuah konstruksi social pengetahuan yang mengartikulasikan kebutuhan, nilai, tujuan dan aspirasi masyarakat dengan melaksanakan proses belajar mengajar untuk mencapai hasil yang diinginkan (Putra, 2023). Sebagai konstruksi social, kurikulum berkembang dan berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Kemajuan yang dicapai oleh masyarakat melalui institusi lain di luar institusi pendidikan akan mempengaruhi artikulasi kebutuhan, nilai, tujuan dan aspirasi masyarakat. Proses belajar mengajar untuk mencapai hasil yang diinginkan juga akan mengalami perubahan sesuai dengan

dinamika perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu, kurikulum perlu diubah dari waktu ke waktu supaya ketika dijalankan dapat terus mencapai hasil yang diinginkan oleh masyarakat (Sherly, 2020).

Manajemen kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis mengemban peran sebagai berikut :

#### 1. Peran Konservatif

Kurikulum memiliki tugas dan tanggung jawab mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Sekolah sebagai suatu lembaga sosial dituntut dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku para siswa dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Karena itu pendidikan pada hakekatnya berfungsi pula menjembatani antara siswa dengan orang dewasa di dalam proses pembudayaan yang semakin berkembang menjadi lebih kompleks, dan disinilah peranan kurikulum turut membantu proses tersebut. Melalui kurikulum siswa perlu memahami dan menyadari norma-norma dan pandangan hidup masyarakatnya, sehingga ketika kembali ke masyarakat, dapat menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan norma-norma tersebut.

#### 2. Peranan Kreatif

Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif, dalam arti mencipta dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang dalam masyarakat. Guna

membantu setiap individu mengembangkan semua potensi yang ada padanya, maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan dan keterampilan yang baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

### 3. Peranan Kritis / Evaluatif

Kebudayaan senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai, memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Kurikulum berperan menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dimiliki anak didik. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan masa mendatang dihilangkan dan diadakan modifikasi dan perbaikan, sehingga kurikulum perlu mengadakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu. Demikian juga sebaliknya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan budaya setempat mungkin akan ditolak dan tidak dipakai, atau dipakai dengan diwarnai nilai-nilai lokal, sehingga menjadi nilai-nilai yang dapat diterima masyarakat setempat (Zohriah et al., 2023)

Dalam implementasinya manajemen kurikulum merupakan tahapan rangkaian proses dalam melaksanakan tujuan dan kebijakan kurikulum pada proses kegiatan mengajar sekolah, membuat siswa mampu menguasai keterampilan, sebagai hasil hubungan dengan lingkungan. Pelaksanaan manajemen kurikulum merupakan suatu tatanan

dalam manajemen kurikulum secara terarah, tersusun, terukur dalam mencapai tujuan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki wewenang (Meliza, Siraj, Zahriyanti, 2024). Perlu adanya manajemen kurikulum dalam menjalankan proses pembelajaran, agar pengelolaan sekolah dapat berjalan sesuai ketentuan, tepat, dan optimal. Sekolah didorong untuk memanfaatkan seluruh sumber pembelajaran dan semua komponen dari kurikulum agar tercapainya tujuan Pendidikan.

### 2) Manajemen Personalia

Bagi bangsa Indonesia, Pendidikan merupakan kebutuhan pokok, serta satu perwujudan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu Pendidikan harus dijadikan factor pembangunan sumber daya manusia. Oleh sebab itu jika sumber daya manusia sudah terbangun maka akan mempengaruhi terhadap pembangunan lainnya, baik itu dalam pembangunan ekonomi, politik, social, dan budayanya.

Keberhasilan suatu pendidikan tidak hanya dilihat dari manajemen peserta didik, kurikulum dan sebagainya, tetapi juga manajemen personalia ikut berperan dalam keberhasilan dalam dunia pendidikan. Maka dengan demikian diperlukan manajemen personalia. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan, pengadaan, pengembangan dan pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu dan

organisasi dalam masyarakat (Tiara, Supriyadi, Martini, 2023).

Kepala sekolah/madrasah wajib mendayagunakan seluruh personil secara efektif dan efisien agar tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau madrasah tersebut tercapai secara optimal. Pendayagunaan ini ditempuh dengan jalan memberikan tugas-tugas jabatan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing individu. Oleh sebab itu adanya pembagian tugas “*job description*” yang jelas sangat diperlukan dalam manajemen personalia (Romdloni, 2017).

Fungsi manajemen personalia dalam bukunya Edwin B. Flippo adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan tenaga kerja. Fungsi operasional pertama dari manajemen personalia adalah berupa usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan untuk menyelesaikan sasaran organisasi. Hal-hal yang dilakukan dalam kaitan ini adalah penentuan sumber daya manusia yang diperlukan dan perekrutannya, seleksi dan penempatan.
- b. Pengembangan tenaga kerja. Setelah personalia diperoleh, mereka harus dikembangkan sampai pada tingkat tertentu. Pengembangan merupakan peningkatan keterampilan melalui pelatihan yang perlu untuk prestasi kerja yang tepat.
- c. Kompensasi (imbalan) tenaga kerja. Fungsi ini dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai yang layak kepada personalia untuk sumbangan

mereka kepada tujuan organisasi. Struktur kompensasi meliputi, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan kehadiran dan tunjangan jabatan.

- d. Integrasi (penyatuan) tenaga kerja. Setelah karyawan diperoleh, dikembangkan, dan diberi kompensasi secara layak, maka selanjutnya adalah integrasi. Integrasi merupakan usaha untuk menghasilkan suatu kecocokan yang layak atas kepentingan-kepentingan perorangan, masyarakat, dan organisasi.
- e. Pemeliharaan tenaga kerja. Jika kita telah melaksanakan fungsi-fungsi di atas dengan baik, maka yang tidak kalah pentingnya adalah pemeliharaan pegawai. Pemeliharaan merupakan usaha untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan untuk bekerja para pegawai.
- f. Pemutusan hubungan kerja. Fungsi terakhir dari manajemen personalia adalah pemutusan hubungan kerja dan mengembalikan para pekerja kepada masyarakat. Sebagian besar karyawan tidak meninggal dunia pada masa kerjanya. Organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemutusan hubungan kerja sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, dan menjamin bahwa warga masyarakat yang dikembalikan itu berada dalam keadaan yang sebaik mungkin.

### 3) Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana merupakan instrumen penting dalam keberlangsungan Pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menuju proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sarana prasarana Pendidikan dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai *Educational Facilities* atau dikenal dengan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan artinya segala sesuatu (alat dan barang) yang memfasilitasi atau yang memberi kemudahan dalam menyelenggarakan Pendidikan. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang baik akan mendukung terhadap suksesnya proses belajar mengajar di sekolah (Zohriah et al., 2023).

Fungsi manajemen sarana dan prasarana Pendidikan yaitu dimana dalam pembuatan sarana dan prasarana harus berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan napa yang dibutuhkan oleh lembaga Pendidikan. Menurut Asri C. Budiningsih alat pembelajaran dapat berfungsi sebagai alat penghubung pemahaman anak didik dari konsep konkret ke abstrak keadaan ini dipahami bahwa siswa dapat mengkaji hal-hal yang abstrak dengan dijumpai oleh pengguna sarana pendidikan tersebut (Resi, 2022).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa sarana

prasarana Pendidikan memiliki fungsi yaitu:

- a. Sebagai suatu sarana yang dapat memperjelas penyampaian informasi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- b. Sebagai alat pendukung dalam meningkatkan serta mengarahkan peserta didik, mendukung interaksi langsung peserta didik dengan lingkungan sehingga dimungkinkan untuk peserta didik belajar secara praktik.
- c. Memberikan kesamaan pengalaman secara langsung tentang peristiwa yang terjadi dalam lingkungan Pendidikan.
- d. Memberikan pengetahuan dalam membantu peserta didik dalam belajar konsep dasar yang benar, konkret serta realistis berdasarkan pengalaman yang didapat dalam lingkungan sarana prasarana di lingkungan Pendidikan.

### 4) Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan dan keuangan tidak pernah lepas dari Lembaga Pendidikan, Manajemen pembiayaan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen pembiayaan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.

Praktik manajemen pembiayaan memiliki pengaruh positif yang

signifikan terhadap kinerja keuangan dan organisasi (Mang'ana, 2023). Dari kutipan tersebut menjelaskan bahwa pentingnya manajemen dalam pembiayaan, penulis juga mengatakan bahwa dalam proses manajemen pembiayaan memiliki dampak positif yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari bidang keuangan dalam sebuah organisasi, tidak dipungkiri dalam dunia pendidikan manajemen pembiayaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan perlu diperhatikan.

Pembiayaan akan berpengaruh pada berbagai komponen di dalam Lembaga Pendidikan. Manajemen pembiayaan di lembaga Pendidikan hendaknya dikelola dengan baik mulai dari perencanaan pengalokasian, pengajuan dana sampai pada tahap penggunaan dana yang dapat membantu peningkatan mutu Pendidikan di Lembaga Pendidikan. Pemimpin Lembaga Pendidikan dan kepala sekolah memiliki wewenang untuk melakukan Tindakan dari penerimaan dana sampai pengeluaran dana. Kepala sekolah juga menjadi penanggung jawab terhadap pembiayaan Pendidikan agar pembiayaan dapat berfungsi dan tepat sasaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan pengalokasiannya.

#### **5) Manajemen Hubungan Masyarakat (Humas)**

Kegiatan utama pada suatu Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Suatu proses pembelajaran adalah usaha untuk memberikan pengalaman belajar guna mengembangkan potensi pada diri peserta didik. Bahkan tidak

seluruh pengalaman belajar dalam ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan dapat diberikan oleh guru. Hal ini diakibatkan keterbatasan sarana dan prasarana Pendidikan yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan. Untuk itu diperlukan adanya Kerjasama dengan masyarakat untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik.

Ketika membahas tentang pengalaman belajar, para ahli Pendidikan banyak merujuk pada pendapat Edgar Dele seorang ahli teknologi Pendidikan yang banyak melakukan penelitian tentang penggunaan media dalam pembelajaran. Bila diperhatikan kerucut pengalaman Edger Dale ada tiga kelompok proses belajar yaitu:

1. belajar melalui abstraksi,
2. belajar melalui pengamatan atau observasi, dan
3. belajar melalui perbuatan atau pengalaman langsung (learning by doing) (Sherly, 2020).

Proses belajar melalui perbuatan atau pengalaman langsung (learning by doing) data terjadi Ketika individu mengalami secara langsung sebuah aktivitas atau kegiatan belajar. Beberapa contoh pembelajaran antara lain ketika siswa bermain peran dalam sebuah drama, misalnya sebagai dokter, maka mereka akan merasakan secara langsung untuk bersikap atau bertingkah laku sebagai dokter. Selain sebagaimana pengalaman belajar manajemen hubungan masyarakat juga memiliki fungsi sebagai dukungan pembiayaan pendidikan dari masyarakat yang anak-anaknya bersekolah di lembaga pendidikan. Hal ini berkaitan dengan lembaga pendidikan negeri

yang sebagian dana bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masih membutuhkan kerjasama dengan masyarakat khususnya dukungan pendanaan program atau kegiatan sekolah berkaitan dengan mutu pembelajaran siswa. Pada lembaga pendidikan swasta yang sebagian besar sumber pendanaannya berasal dari iuran pendidikan dari peserta didik, kerjasama dengan masyarakat menjadi sangat penting.

Satuan Pendidikan juga perlu mengoptimalkan potensi yang ada dalam masyarakat. Hampir setiap sekolah memiliki kepengurusan komite sekolah yang merupakan perwakilan dari unsur sekolah, orang tua dan masyarakat. Fungsi komite di sekolah ini salah satunya adalah untuk membahas kontribusi orangtua dan masyarakat luas dalam dukungan pembiayaan pendidikan. Hubungannya dengan masyarakat luas dapat dimanfaatkan dalam rangka mencari sponsor perusahaan untuk mendukung sebuah acara kegiatan sekolah, mencari sumber pendanaan, tanggung jawab social (*community service responsibilities/CSR*), mencari beasiswa pendidikan untuk siswa yang membutuhkan atau siswa berprestasi, dan bantuan pembiayaan pendidikan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya fungsi manajemen hubungan masyarakat untuk pengembangan karakter peserta didik dengan konsep dan model penguatan pendidikan karakter, melalui berbagai kegiatan peserta didik dapat menumbuh

kembangkan karakter positifnya melalui berbagai kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler dalam pembinaan guru (Zohriah et al., 2023).

### **Pengendalian manajemen sekolah oleh Pemerintah Kota Palembang**

Pengendalian manajemen melibatkan serangkaian kebijakan, peraturan, dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di wilayah tersebut beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang yang mengatur manajemen sekolah bertujuan untuk memastikan pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan standar nasional. Berikut adalah rangkuman mengenai Peraturan Daerah yang relevan, termasuk Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palembang. Perda ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah di wilayah Kota Palembang, termasuk pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan non-formal. Berikut adalah beberapa poin penting yang diatur dalam Perda ini :

1. Kebijakan Pendidikan Lokal:
  - a) Pemerintah Kota Palembang menetapkan kebijakan pendidikan lokal yang sesuai dengan kebijakan nasional namun disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.
  - b) Kebijakan ini mencakup alokasi anggaran, prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan, dan program-program peningkatan kualitas pendidikan.

## 2. Pengawasan dan Evaluasi:

- a) Pemerintah kota melakukan pengawasan rutin terhadap sekolah-sekolah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pendidikan yang ditetapkan.
- b) Evaluasi berkala terhadap kinerja sekolah, termasuk penilaian terhadap hasil belajar siswa dan kinerja guru, dilakukan untuk menentukan area yang perlu perbaikan.

## 3. Pembinaan dan Pelatihan:

- a) Pemerintah kota menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi mereka.
- b) Pendampingan teknis dan manajerial kepada kepala sekolah dan staf administrasi untuk memperkuat kapasitas manajemen sekolah.

## 4. Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya:

- a) Pemerintah kota mengawasi penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan sumber daya lainnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
- b) Penyusunan anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel untuk memaksimalkan penggunaan dana publik dalam meningkatkan mutu pendidikan.

## 5. Pengembangan Infrastruktur:

- a) Pemerintah kota berinvestasi dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas sekolah, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga.
- b) Memastikan akses yang merata terhadap fasilitas pendidikan yang memadai bagi semua siswa.

## Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran:

- a) Mendorong pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal namun tetap sesuai dengan standar nasional.
- b) Implementasi program-program inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar.

## 7. Partisipasi Masyarakat:

- a) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan orang tua dalam pengelolaan sekolah melalui komite sekolah atau mekanisme partisipatif lainnya.
- b) Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan dan evaluasi program pendidikan.

## 8. Pengendalian Mutu Pendidikan:

- a) Pemerintah kota bekerja sama dengan lembaga akreditasi untuk memastikan sekolah-sekolah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- b) Penyelenggaraan ujian dan asesmen standar untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara objektif.

Pengendalian manajemen sekolah di Kota Palembang merupakan upaya pemerintah setempat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pendidikan. Beberapa aspek kunci yang menjadi fokus utama dalam pengendalian ini meliputi kebijakan pendidikan lokal, pengawasan dan evaluasi, pembinaan dan pelatihan, pengelolaan keuangan dan sumber daya, pengembangan infrastruktur, manajemen kurikulum dan pembelajaran, partisipasi masyarakat,

serta pengendalian mutu pendidikan (Dinas Pendidikan Kota Palembang, 2022). Implementasi pengendalian manajemen sekolah oleh Pemerintah Kota Palembang bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan inklusif, sehingga dapat menghasilkan generasi muda yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global.

## KESIMPULAN

Pemerintah Kota Palembang berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengendalian manajemen yang mencakup pengawasan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian untuk memastikan efektivitas operasional sekolah. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pemahaman konsep di tingkat sekolah masih menjadi hambatan. Dengan upaya pembenahan berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, dan penyediaan panduan yang jelas, tantangan ini dapat diatasi untuk mendukung implementasi pengendalian manajemen yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, pengendalian manajemen sekolah oleh Pemerintah Kota Palembang menunjukkan langkah yang positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan terus menerapkan praktik terbaik dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, diharapkan bahwa upaya ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi pendidikan di wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pendidikan Kota Palembang. (2022). *Laporan Tahunan Pendidikan Kota Palembang*. Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mang'ana, K. M., et al. (2023). Financial management practices and performance of agricultural small and medium enterprises in Tanzania. *Elsevier Journal: Social Sciences and Humanities Open*, 7(1).
- Meliza, M., Siraj, S., & Zahriyanti, Z. (2024). Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP*, 5(2), 127-168.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palembang*.
- Putra, M. I. (2023). Politik Dan Kebijakan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Menuju Pendidikan Agama Islam Yang Ideal Di Indonesia. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 21(2), 165-184.
- Resi. (2022). Management of Islamic Education in the Challenges of Society 5.0. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3).
- Romdloni. (2017). Manajemen Personalia sebagai Upaya dalam Meningkatkan Kualitas Personalia di Madrasah. *Evaluasi*, 1(1).
- Sedubun, P. D., Ratumanan, T. G., & Laurens, T. (2024). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

- (MBS) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kepulauan Aru: Implementation of School Based Management (SBM) at Senior High School (SMA) Negeri 3 Kepulauan Aru. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(02), 730-747.
- Sherly, et al. (2020). *Manajemen Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktis*. Widina Bhakti Persada.
- Sugiyono. (2019). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Alfabeta.
- Syafe'i, I. (2011). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Deepublish.
- Tiara, Z. D., Supriyadi, D., & Martini, N. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Lembaga Pendidikan. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 450-456.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wartoyo, F. X. (2016). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 216–230. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8734>
- Zohriah, A., Faujiah, H., Adnan, A., & Nafis Badri, M. S. M. (2023). Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(3), 704–713. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i3.4081>